

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK GADAI MOBIL
KREDITAN
(Studi Kasus di Desa Canggu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung
Selatan)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Penelitian dan
Untuk Sidangkan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

**Nama : Wilda Awalinda
Npm : 1421030149
Jurusan : Muamalah**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

Praktek gadai sudah lama dipraktekkan ditengah-tengah masyarakat Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Praktek gadai mobil yang terjadi di Desa tersebut yaitu pihak pertama (*Rahn*) pihak kedua (*Murtahin*) dan pihak ketiga (intasi/lembaga *leasing*), yang dimana akad dalam transaksi tersebut cacat (tidak jelas) yaitu pihak pertama tidak terus terang dan masih ada dokumen-dokumen yang tidak dijelaskan kepada *murtahin* atau adanya syarat-syarat dalam akad tersebut yang masih disembunyikan, sehingga dengan demikian hal tersebut rentang timbulnya sengketa. Pada masa sebelum jatuh tempo pelunasan ditarik pihak ketiga (*Leasing*) dengan alasan bahwa mobil tersebut masih dalam angsuran dan angsuran tersebutpun menunggak dalam pembayaran kepada pihak *leasing* serta adanya pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin* terlebih dahulu.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan/ praktik gadai mobil kredit di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gadai mobil kredit tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas proses pelaksanaan gadai mobil kredit dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan gadai mobil kredit di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Researc*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan, yakni di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tentang praktik gadai mobil kredit. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi, pengolahan data dilakukan melalui *editing* dan sistematisasi data. Sedangkan dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik gadai mobil kredit yang dilakukan oleh masyarakat dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak secara tertulis akan tetapi hanya secara lisan saja, hanya mempunyai bukti transaksi saja, dan tidak mendatangkan para saksi, adanya pemanfaatan barang gadai tanpa seizin *Rahin* pada akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang tidak sesuai dengan teori dalam hukum Islam terutama dalam transaksi gadai syari'ah yaitu *borg* bukan seutuhnya milik *rahin* (barang hutang) selain itu adanya penambahan hutang yang terpisah oleh pinjaman gadai itu sendiri. Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat *rahn*. Gadai dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta memberikan kemaslahatan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Wilda Awalinda
NPM : 1421030149
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Mobil Kreditan.
(Studi di Desa Canggü Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag
NIP. 19570705198303100

Pembimbing II

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
NIP. 196901051998031003

Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah

H.A. Khur'edi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

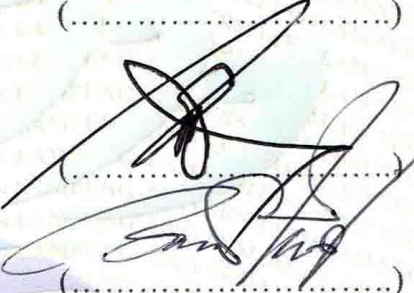
Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK GADAI MOBIL KREDITAN (Studi Kasus Di Desa Cangu Kecamatan Kalianda)”, disusun oleh Nama: Wilda Awalinda NPM. 1421030149, Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Kamis/ 01 Februari 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)

Penguji I : H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H (.....)

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag (.....)



**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**


D. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً^ط

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. (Q.S Al-Baqarah:283)¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ^ج

Arinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”²



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'An dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 71.

² *Ibid.*, h. 60

PERSEMBAHAN

Skripsi Sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku ayah dan ibu tercinta yang telah melindungi, mengasuh, melindungidan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa, serta senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan saya, dan berkat do'a restu keduanyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Untuk keluarga besar yang selalu memberikan semangat motivasi bagi keberhasilam saya selama studi.
3. Terkhusus Almamaterku (UIN Raden Intan Lampung) yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Wilda Awalinda, Dilahirkan pada tanggal 14 Mei tahun 1996 di Kalianda. Putri pertama dari empat bersaudara. Adapun pendidikan yang telah dicapai oleh penulis antara lain:

1. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar pada Sekolah Dasar Negeri 2 Cangu, pada tahun 2008.
2. Melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Kalianda, lulus pada tahun 2011.
3. Pendidikan pada jenjang menengah pada SMK Negeri 1 Kalianda, selesai pada tahun 2014.
4. Melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dan mengambil Program studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

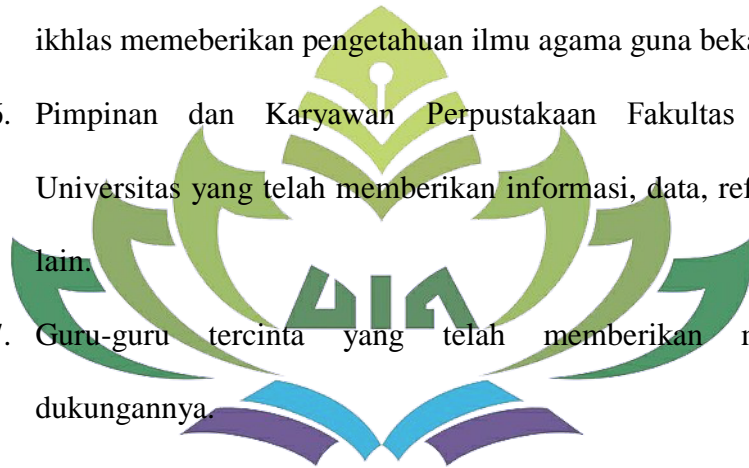
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Mobil Kreditan” (Studi Kasus Di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan) dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., MH. Selaku ketua jurusan muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. Selaku Pembimbing 1 dan Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu salam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik.
4. Kepala desa dan masyarakat Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen, para Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memeberikan pengetahuan ilmu agama guna bekal di hari nanti.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.
7. Guru-guru tercinta yang telah memberikan motivasi serta dukungannya.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Oleh karena itu saran dan masukan dari para pembaca sangat penulis harapkan dari kesempurnaan skripsi ini,

Bandar Lampung
Penulis

Wilda Awalinda

DAFTAS ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gadai	16
B. Landasan Hukum Gadai	19
C. Rukun Dan Syarat Gadai.....	21
1. Rukun Gadai.....	21
2. Syarat-Syarat Gadai	25
D. Status dan Jenis Barang Gadai	36
1. Status Barang Gadai	36
2. Jenis Barang Gadai.....	37
E. Akad Gadai.....	38

F. Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	45
G. Pertambahan Jaminan <i>Borg</i>	46
H. Pertambahan Utang	47
I. Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai	48
1. <i>Rahin</i> memanfaatkan <i>Marhun</i>	50
2. <i>Murtahin</i> memanfaatkan <i>Marhun</i>	51
J. Hak Kewajiban Pihak Penerima Gadai	56
1. Hak dan Kewajiban <i>murtahin</i>	56
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai	57
K. Musnah Dan Berakhirnya Barang Gadai	58

BAB III. PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Cangu.....	62
1. Sejarah Desa Cangu	62
2. Kondisi Geografis Desa Cangu	63
3. Kondisi Pemerintahan Desa Cangu.....	64
4. Keadaan Sosial Desa Cangu.....	66
5. Keadaan Ekonomi Penduduk	69
6. Data Penduduk Lainnya	70
B. Pelaksanaan Gadai Mobil Kreditan di Masyarakat Desa Cangu	74

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Praktek Gadai Mobil Kreditan di Desa Cangu Kecamatan Kalianda	79
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Gadai Mobil Kreditan di Desa Cangu Kecamatan Kalianda	82
1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Praktek Gadai Mobil Kreditan di Desa Cangu Kecamatan Kalianda.....	82
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai yang Berupa Barang Hutang yang terjadi di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.....	86

3. Tinjauan Hukum Islam Praktik Gadai Terhadap Penambahan Utang yang terjadi di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.....	88
--	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan menegaskan artian dan maksud dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dengan adanya penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksudkan. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan hukum Islam Tentang Transaksi Gadai Mobil Kreditan (Studi Kasus Di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan) Pada judul tersebut yang perlu dijelaskan yaitu:

Tinjaun yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).³

Hukum Islam menurut ulama Ushul Fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.⁴

Transaksi ialah suatu keadaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu adanya pihak yang memberi dan pihak yang menerima mengenai adanya hubungan timbal balik yaitu tukar menukar barang dengan uang adapun hal-hal diberikan harus sesuai dengan imbalan/bayaran yang diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Balai Pustaka 1991), Edisi II, h. 1060.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1997), *Cet-I*, h 5.

Akad adalah menghubungkan antara dua perkataan, yang dapat berupa janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya, demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.⁵

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak atau benda tidak bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur (orang yang memberi utang) untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda.⁶

Mobil kredit adalah sesuatu kendaraan yang dipakai untuk dinaiki dengan pembayaran angsuran atau diteguhkan.⁷

Maka berdasarkan pengertian komponen kata-kata dalam judul skripsi ini dapat disimpulkan sebagai upaya penyelidikan hukum syariat Islam terhadap praktik gadai mobil kreditan di Desa Canggus Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis memilih judul di atas karena didasarkan pada :

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksidalam Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010), Cet-I, h.15.

⁶ Niniek Suparni, *KUH Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet VI, h. 290.

⁷ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2011), h. 988.

1. Secara Objektivitas

- a. Gadai merupakan salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan banyak dilakukan oleh masyarakat terutama di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Karena fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan akad dalam transaksi gadai sehingga dapat menimbulkan konflik sosial yang terjadi di masyarakat Kelurahan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

2. Secara Subjektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, maka sangat memungkinkan untuk diteliti.
- b. Sesuai dengan disiplin Ilmu yang dipelajari selama ini pada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan transaksi, Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong menolong, baik dengan jalan tukar menukar, sewa menyewa bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial (*social creatur*). Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pembelian dan bisa berupa pinjaman.

(gadai).⁸ Bahkan Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong, seperti firman Allah Swt :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q.S Al-Maidah ayat 2).⁹

Berdasarkan ayat di atas Bentuk dari tolong menolong hal ini termasuk masalah gadai, Islam memeberikan tuntunan yang jelas. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagian dari Muamalah. Oleh karena itu,

⁸ Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Danayah, 2003), h. 02.

⁹ Jejen Musfah, *Indeks Al-Qur’An Praktis* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), h. 603.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’An dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 71.

merupakan suatu hal yang diperbolehkan jika seseorang dalam kesusahan melakukan praktik gadai asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam gadai.

Dalam kitab-kitab fiqih , para ulama telah menetapkan suatu aturan bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh mengambil manfaatnya, baik yang dilakukan oleh pemilik barang gadai tersebut (*rahin*) maupun dilakukan oleh penerimanya (*murtahin*). Hal ini karena *rahin* tidak memiliki barang gadai tersebut secara sempurna yang memungkinkan ia sewaktu-waktu melakukan perbuatan hukum atas barang miliknya itu, seperti menjual, mewakafkan, mengibahkan dll.¹¹

Gadai dalam hukum perdata disebut dalam istilah *pand* yang objeknya benda bergerak, sedangkan benda tetap atau tidak bergerak tidak bisa dijadikan objek gadai tetapi dapat menjadi hypotheek. Menurut bunyi pasal 1162 BW (*Burgerlik Wetboek*) bahwa yang dimaksud dengan Hypotheek adalah suatu hak kebendaan atau suatu benda tidak bergerak ,bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari (Pendapatan Penjualan) benda itu.

Menurut Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al Husaini mendefinisakan *Rahn* sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat. *Murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.¹²

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), cet ke-2 h.112.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syaria* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 20.

Agar praktek gadai itu menjadi sah dan terlaksana tentunya *Rahin* dan *murtahin* haruslah memenuhi rukun dan syarat gadai. Mengenai rukun gadai yaitu adanya *Ar-Rahn* (yang menggadaikan), *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), *Al-Marhun* (barang yang digadaikan), *Al-Marhun bih* (utang), serta adanya *sighat*, *Ijab*, dan *Qabul*.¹³

Praktik gadai dimasyarakat sudah biasa dilakukan, namun seringkali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit. Bahkan terkadang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut akan tetapi sebagian besar praktik gadai ini dilakukan dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yaitu mengenai Praktik gadai mobil yang terdapat tiga pihak, pihak pertama (*Rahn*) pihak kedua (*Murtahin*) dan pihak ketiga (intasi/lembaga *leasing*), dalam praktek gadai ini dengan memberikan jaminan satu unit mobil kepada *murtahin* yang dimana mobil tersebut masih dalam kreditan atau barang yang masih dalam jaminan pihak *leasing* atas pinjaman uang yang dilakukan oleh *rahn*. Akibat faktor ekonomi yang tidak stabil yang menyebabkan *Rahin* menggadaikan mobil tersebut yang masih dalam keadaan kredit dan menunggak angsurannya.

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: akonisia, 2012), Edisi 4, h. 175

Dalam praktik mobil kreditan yang terjadi di Desa Cangu sebelum sahnya suatu transaksi tersebut maka diadakannya akad terlebih dahulu yang dimana akad dalam transaksi tersebut pihak pertama tidak terungkap dan masih ada dokumen-dokumen yang tidak dijelaskan kepada *murtahin* atau adanya syarat-syarat dalam akad tersebut yang masih disembunyikan, sehingga dengan demikian hal tersebut rentang timbulnya sengketa. Serta adanya pemanfaatan barang gadai oleh *Murtahin* yang sebelumnya dalam perjanjian/akad tidak disebutkan mengenai pemakaian barang gadai tersebut atau pihak *Murtahin* belum meminta izin oleh *Rahin*.

Akad semacam ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang merasa dirugikan adalah pihak berpiutang (*Murtahin*). Dalam Islam Transaksi yang diperbolehkan haruslah memenuhi ketentuan syara' yaitu akadnya harus jelas, transparan sehingga tidak ada yang disembunyikan dan akad tersebut tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak sehingga memberikan kemaslahatan bagi orang lain. Selain itu pula perdagangan dilarang dalam Islam jika ternyata hal tersebut hanya melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang diusung oleh etika (norma) Islam. Misalnya *Tadlis (unknown to one party)*, di mana terdapat ketidaktahuan diantara pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga dapat menimbulkan kecurangan atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi (*asymmetric information*). Ini dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *an taraddin minhum* (kerelaan atau suka sama suka).

Berdasarkan permasalahan tersebut tampak tidak sesuai antara normatif dengan praktek dan terlihat dalam latar belakang masalah tersebut terdapatlah dua permasalahan yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Mobil Kreditan yang terjadi di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, kiranya dapat ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai mobil kreditan di Desa cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi gadai mobil kreditan di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulis dalam penelitian sudah tentu memiliki maksud dan tujuan. Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan praktek gadai mobil kreditan di Desa cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai mobil kreditan yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik gadai terutama mengenai akad gadai menurut hukum Islam.
- b. Secara praktis diharapkan sebagai bacaan bagi peneliti ilmu hukum atau bagi pembaca pada umumnya sehingga dapat diambil langsung manfaat serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktik gadai khususnya masyarakat Desa Cangu.

F. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Fokus Penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari mengenai akad dalam transaksi gadai mobil kreditan menurut tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi obyek penelitian (masyarakat Desa Cangu Kecamatan Kalianda ,khususnya tinjauan hukum Islam mengenai praktik gadai mobil kreditan).¹⁴

b. Data sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah, makalah-makalah atau jurnal-jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul yang dimaksud. ¹⁵ data ini diperoleh dari kitab-kitab fiqh, Al-Qur'an, Kamus Bahasa Indonesia, Hadits, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan skripsi ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.. 30.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *metodelogi Research* (Yogyhakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986), h. 27 .

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan atau *field Research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya.¹⁶ adapun data-data yang yang diperlakukan adalah mengenai pelaksanaan gadai terutama mengenai akad dalam transaksi gadai yang terjadi pada masyarakat di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik gadai mobil ditinjau dari hukum Islam.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999), h. 33.

¹⁷ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁸ Dalam hal ini populasi penulis yang dijadikan sampel adalah para pelaku masyarakat yang menggadaikan mobil dan pelaku masyarakat sebagai penerima gadai Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Cangu antara penggadaikan dan penerima gadai berjumlah kurang dari 100 orang.

Berdasarkan buku Suharsimi Ariskunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua jika objeknya lebih besar dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Oleh karena itu, berdasarkan jumlah sampel yang telah dijelaskan, maka dapat diambil sebanyak 10 % dari populasi yang tersedia yaitu 10 orang.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini , pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti¹⁹. Penyusun menggunakan untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung, yang ditujukan oleh masyarakat Desa Cangu

¹⁸ *Ibid.* h. 102.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia 19860), cet.- 3 , h.15.

Kecamatan Kalianda. Cara kerja alat pengumpulan data (observasi) ini mengamati secara sengaja ataupun tidak mengenai kejadian-kejadian dan bagaimana situasi lingkungan yang ada di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu²⁰. Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam untuk pengumpulan data ini dapat dikatakan melalui teknik wawancara secara langsung²¹. Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya permasalahan ini berkaitan dengan Gadai mobil kreditan dan mengenai akad dalam transaksi gadai mobil kreditan.

Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang menggadaikan dan pihak yang berpiutang serta untuk memperkuat adanya hak yang harus diluruskan.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bima Aksara, 1981), h. 202..

²¹ Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Fakultas Syariah: IAIN Raden Intan Lampung, 2014),h. 107

c. Dokumentasi atau Bahan Pustaka

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan dan kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²² Dalam mengumpulkan data peneliti ini adalah dengan mengumpulkan data dalam bentuk buku-buku atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Serta dokumen-dokumen gadai sampel penelitian Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung dan menjadi sumber dalam studi ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasikan dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan- tahapan sebagai berikut :

²² *Ibid.*, h. 114

1. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
2. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
3. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²³
4. *Sistematisasi* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁴

b. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan, atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²⁵ Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu mengambil suatu cara penganalisaan data dengan berpijak pada data yang bersifat khusus ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999), h. 86.

²⁴ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.

²⁵ Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001), h.3.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gadai

Gadai dalam istilah bahasa arab dinamai dengan *Rahn* dan dapat juga dengan *Al-Habsu*. Secara etimologi arti kata *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan. Dan untuk yang kedua (Al-Hasbu) Firman Allah SWT yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“ tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”,
(Q.S Al-Muddatsir :38)²⁶

Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.²⁷

Gadai dalam undang-undang KUH Perdata Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelelang

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 576.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa H.Kamaladun A.Marjuki (Bandung: PT Al-Maarif, 1993), jilid 12, h. 139.

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan,²⁸

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas adapun pengertian gadai yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut.

جَعَلَ عَيْنَ يَجُوزُ بِبَيْعِهَا وَثِيقَةً بَدَلِ يَنْ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ قَائِمِهِ

*Menjadikan sesuatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utang.*²⁹

2. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut.

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعَدَّ رَاسْتِيفًا
نَهْ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

*Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.*³⁰

3. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut.

ثِيْبٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْ خَدَمِنْ مَالِكِهِ ثَوْتَقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

*Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat utang yang tetap (mengikat).*³¹

4. *Rahn* adalah perjanjian penahanan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda *marhun bih*, sehingga dengan

²⁸ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Cet 40, h. 297.

²⁹ Zainudin Ali, *Hukum gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet 1, h.2.

³⁰ *Ibid.*, h.2.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet 2, h.252.

adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³²

5. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.³³

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (*Rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (*rahiin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Apabila memperhatikan pengertian gadai (*Rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *Rahn* pada prinsipnya merupakan akad *tabarru'* yang tidak mewajibkan imbalan.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai* (Bandung: Al-Maarif, 1983), h.50.

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), Cet 67, h. 309.

Dalam peristilahan sehari-hari pihak yang menggadaikan disebut dengan pemberi gadai dan yang menerima gadai, dinamakan penerima atau pemegang gadai.

B. Landasan Hukum Gadai

Dasar hukum diperbolehkannya *rahn* atas dasar firman Allah, sunnah Rasul, dan Ijma, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama. Dalam memberikan dasar hukum diperbolehkannya *rahn* dalam bermuamalah berdasarkan pada firman Allah antara lain:

a. Surat Al-Baqarah ayat 282:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."³⁴

b. Surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ۗ وَاللَّهُ أُولِيٰ تَقَاتٍ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ

.Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 48.

dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁵

Artinya, pokok pertama baik ketika berada di rumah atau dalam perjalanan, hendaklah perjanjian utang-piutang dituliskan. Tetapi kalau terpaksa penulis tidak ada, atau sama-sama terburu didalam perjalanan di antara yang berutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis, peganglah oleh yang memberi utang itu agunan atau gadaian, sebagai jaminan dari uangnya yang dipinjam atau diutang itu.³⁶

2. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ³⁷

Artinya: “Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

³⁵ Ibid., h.49

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (yayasan nurul Islam), Juz 3, h. .81.

³⁷ Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunnan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 418.

و سلم الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَأً وَلَيْسَ الدَّرُّ وَيَشْرَبُ
النَّقَّةُ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَأً وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّقَّةُ
(رواه البخاري)³⁸

Artinya : “ diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dia berkata :
Rasulullah SAW telah bersabda, “ hewan tunggangannya yang
digadaikan boleh ditunggangi oleh penerima gadai sebanding
dengan biaya perawatannya, dan hewan perah yang
digadaikan boleh diminum air susunya oleh penerima gadai
sebanding dengan biaya perawatannya. Penunggang dan
peminum air susu hewan gadai tersebut harus menanggung
biayannya”

3. Ijma Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal
dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang
menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang
Yahudi. Para ulama juga mengambil dari contoh dari Nabi Muhammad
SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi
kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa itu tidak
lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan
para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang
diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka.

C. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai

³⁸ Ibid., h. 419

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang-piutang (*Al-Dain*), karena tidak akan terjadi dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada utang yang dimilikinya.³⁹ Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutangi karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya. Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah yaitu:⁴⁰

a. *Ar-Rahn* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, dan lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

c. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

d. *Al-Marhun Bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

³⁹ Zaiunudin dan Muhammad jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlaq* (Bandung:Pustaka Setia,1999), Cet.1, h. 18.

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta:Ekonsia, 2015), Edisi 4, h.175.

e. *Sighat, ijab dan Qabul.*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Kesepakatan antara *Rahin* dan *Murtahin* dalam melakukan transaksi gadai pada dasarnya berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:⁴¹

- a. Akad *Rahn*, yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai disebutkan bila waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.
- b. Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Menurut sayyid sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu: ⁴²

- a. Orangnya sudah dewasa
- b. Berfikir sehat
- c. Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai

⁴¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta:Ekonsia, 2003), Cet 1, h.160.

⁴² *Ibid.* h.162.

- d. Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadaai barang atau benda yang dijasikan jaminan itu dapat berupa emas.

Jika semua ketentuan di atas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan *thasarruf*, maka akad *ar-rahn* itu sah.

Harta yang digunakan disebut *al-marhun* (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahkan terimakan oleh *ar-rahin* tersebut. Dengan serah terima itu agunan akan berada dibawah kekuasaan *al-murtahin*. Jika harta agunan itu termasuk yang bisa dipindah-pindah seperti kulkas dan bahan elektronik, perhiasan dan semisalnya, maka serah terimanya adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan *al-murtahin*, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah, lahan sawah, dan lain-lain.⁴³

Sedangkan Ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun, menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada empat yaitu:⁴⁴

- a. *Shigat* (*lafadz ijab dan qabul*)
- b. Orang yang berakad (*rahin dan murtahin*)
- c. Harta yang dijadikan *marhun* dan
- d. Utang (*marhun bih*)

⁴³ Heri Sudarsono, *Ibid.*,h.163.

⁴⁴ Heri Sudarsono, *Ibid.* h.164.

Ulama hanabilah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya ijab dan qabul. Menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.⁴⁵

2. Syarat-Syarat Gadai

Dalam *rahn* disyaratkan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

a. Syarat *Rahin* dan *Murtahin*

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli *thasarruf*, artinya membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.⁴⁶

b. Syarat *sight* (*lafadz*)

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad dibarengi, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* telah habis dan

⁴⁵ Heri Sudarsono, *Ibid.* h.165.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet 2, h.254..

marhun bih belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* memanfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan *tabiat* akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan *tabiat rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahin* itu, pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya disyaratkan bahwa *marhun* itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan *rahin* tidak mampu membayarnya.⁴⁷

c. Syarat *Marhun* (barang gadai)

Marhun adalah barang yang digadaikan oleh *rahin* kepada *murtahin*, syarat *marhun* dalam *rahn* berlaku ketentuan bahwa barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan. Sesuai dengan ketentuan, syarat *marhun* haruslah barang yang dapat diperjual belikan, maka syarat *marhun* menurut pakar fiqh antara lain :⁴⁸

- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Ibid.* h.255.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ibid.* h.255.

- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya *khamar* tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan *khamar* tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- 4) Agunan itu milik sah orang yang berutang.
- 5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

d. Syarat *Marhun Bih* (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*, Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- 1) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan.

Menurut Ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa uang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

- 2) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan.

jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

3) Hak atas *marhun bih* harus jelas.

Dengan demikian tidak boleh dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Syarat-syarat gadai yang diungkapkan di atas menggambarkan secara umum mengenai syarat-syarat *rahn*. Namun pada kenyataanya, para ulama tidak sepakat dalam memberikan syarat-syarat *rahn*, sehingga terjadi perkembangan berbagai versi yang menyangkut kategori yang dapat dimasukkan sebagai syarat-syarat *rahn*. Syarat-syarat *rahn* tersebut akan dikemukakan pendapat dari para Imam mazhab sebagai berikut:⁴⁹

a) Penapat ulama mazhab Maliki

Pendapat ulama dari kalangan mazhab Imam Malik berkenaan dengan syarat-syarat *rahn* terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- (1) Bagian yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu pihak *rahin* dan pihak *murtahin*.

Syarat ini mengharuskan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi hukum gadai harus dua orang yang memenuhi keabsahan akad dalam jual beli yang tetap (mengikat). Jika akad dilakukan oleh seorang anak yang masih *mumayyiz*, maka salah satunya dan/atau keduanya maka akadnya tetap sah tetapi tidak mengikat. Kecuali, jika

⁴⁹ Zainudin Ali, *Op.Cit*, h.23.

anak *mumayyiz* yang melakukan akad tersebut diijinkan oleh walinya.

(2) Bagian yang berkaitan dengan *marhun* (barang gadai).

Syarat ini mengharuskan barang yang barang yang digadaikan juga adalah barang yang sah bila diperjual belikan. Karena itu, najis dan barang-barang lainnya yang dalam jual beli juga dilarang.

(3) Bagian yang berkaitan dengan *marhun bih* (uang yang

dipinjamkan). Syarat ini mengharuskan utang sudah tetap, baik pada saat itu maupun dimasa yang akan datang. Yang dimaksud dalam hal ini dapat diungkapkan sebagai contoh tentang sahnya akad gadai pada pengupahan, yakni pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.

(4) Bagian yang berkaitan dengan akad. Hal yang dimaksud,

mengharuskan bahwa akad gadai hendaknya tidak menetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan gadai, misalnya akad gadai yang menghendaki *marhun* harus dijual jika orang yang menggadaikan (*rahin*) tidak dapat melunasinya.

b) Pendapat ulama mazhab Hanafi

Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat gadai terbagi atas 3 (tiga), yaitu:

(1) Bagian pertama, syarat terjadinya akad *rahn*, yakni *marhun* (barang gadai), yang berupa harta benda, dan *marhun bih* (utang), yang merupakan sebab terjadinya gadai.

(2) Bagian kedua; yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya akad *rahn*, yaitu hendaknya berkaitan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akal, tidak disandarkan pada waktu tertentu, *marhun* (barang gadai) dapat dibedakan dari lainnya, *marhun* berada dalam kekuasaan penerima gadai setelah diterima olehnya, *marhun* benar-benar kosong *marhun* bukanlah barang najis, dan *marhun* bukan termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaat.

(3) Bagian ketiga; yaitu syarat tetapnya akad *rahn*. Akad *rahn* telah tetap apabila *marhun* diterima oleh *murtahin* (penerima gadai) dengan terjadinya *ijab* dan *qabul*.

c) Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang hanya menekankan ketentuan barang gadai, yang mempersyaratkan keabsahan barang yang diperjual belikan. Pengikut dari kedua mazhab dimaksud, bahwa mengatakan segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan, atau disedekahkan. Karena itu, menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya, dirham, dinar, tanah dan barang-barang

lainnya. Selama itu halal diperjual belikan, maka halal pula digadaikan

Selain syarat-syarat para ulama, fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu harus dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn*kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi uang, dan yang dibutuhkan sudah diterima oleh peminjam uang, apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.⁵⁰

e. Syarat Kesempurnaan *Rahn* (Memegang Barang)⁵¹

Secara umum, ulama fiqh sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang *marhun* adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut ulama Malikiyah akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan kabul. Akan tetapi *murtahin* harus meminta kepada *rahin* barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan *borg* di tangan *rahin*, *rahn* menjadi batal .

1) Cara Memegang *marhun*

Adalah penyerahan *marhun* secara nyata atau dengan wasilah yang memberikan utang (*murtahin*).

Diantara syarat-syarat memegang adalah:

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Loc.Cit.* h.255.

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), h.164.

- a) Atas seizin *rahin*
- b) *Rahin* atau *murtahin* harus ahli dalam berakad
- c) *Murtahin* harus tetap memegang *rahin*

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah berpendapat bahwa diantara syarat memegang, *murtahin* harus tetap atau lama memegang *borg*. Dengan demikian menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah *rahn* batal jika *murtahin* meminjamkan atau menitipkan *borg* kepada *rahin*. Adapun menurut ulama Hanabilah, akad *rahn* tidak batal, tetapi hilang kelazimannya dan akan menjadi lazim kembali jika *rahin* mengembalikannya kepada *murtahin*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau meminjamkan *borg* kepada *rahin* misalnya untuk memanfaatkannya

2) Orang yang Berkuasa atas *Borg*

Orang yang menguasai *borg* adalah *murtahin* atau wakilnya. Dipandang tidak sah jika orang yang memegang *borg* adalah *rahin* sebab salah satu tujuan *borg* adalah menjaga keamanan bagi *murtahin*.

Borg dititipkan kepada seseorang yang disepakati oleh *rahin* atau *murtahin*, orang tersebut disebut *adl*

a) Syarat-syarat *Adl*

Diantara syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *adl* adalah memiliki dua sifat yaitu amanah dan bertanggung jawab.

Selain itu disyaratkan pula *adl* harus orang yang sah dijadikan wakil bagi *rahin* dan *murtahin*. Dengan demikian maka *adl* tidak boleh anak kecil, gila, dan lain-lain.

Murtahin dan *rahin* dibolehkan mempercayakan *borg* kepada orang lain.

b) *Borg* terlepas dari *adl*

Borg dapat lepas dari *adl* dengan alasan berikut:

- (1) Habisnya masa *rahn*
- (2) *Rahin* meninggal, menurut Hanabilah dan Syafi'iyah *borg* tidak lepas jika yang meninggal adalah *murtahin*.
- (3) *Adl* meninggal ahli warisnya tidak berhak memegang *borg*, kecuali atas izin *murtahin* dan *rahin*.
- (4) *Adl* gila.
- (5) *Rahin* melepaskan atau membatalkan *borg* akan tetapi tidak lepas jika yang membatalkan *murtahin*, sebab yang menjadi wakilnya adalah *rahin*

c) Hukum *Adl*

Adl memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) *Adl* harus menjaga *borg* sebagaimana ia menjaga barang miliknya.
- (2) *Adl* harus tetap memegang *borg* sebelum ada izin dari yang melakukan akad untuk menyerahkan kepada orang lain.
- (3) *Adl* tidak boleh memanfaatkan *borg*

(4) Jika *borg* rusak tanpa disengaja, kerusakan ditanggung oleh *murtahin*.

(5) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *adl* tidak boleh melepaskan atau membatalkan *borg*, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *Adl* bebas untuk melepaskannya.

f. Beberapa Hal yang Berkaitan dengan Syarat *Rahn*⁵²

Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *rahn*, antara lain sebagai berikut:

1) *Borg* harus utuh

Bebepa ulama berbeda pendapat dalam menentukan *borg* yang tidak utuh, seperti setengah sepertiga dan lain-lain.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *borg* harus utuh, tidak boleh terpisah. Di antara alsannya, adalah *rahn* harus tetap berada di tangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang.

Jumhur ulama, membolehkan *borg* dengan barang yang tidak utuh atau sebagiannya asalkan sah diperjual belikan.

2) *Borg* yang berkaitan dengan benda lainnya

Ulama Hanafiyah berpendapat sah jika *borg* berkaitan dengan benda lain.

⁵² Rachmat syafe'i., *Ibid.*, h.166.

Jumhur ulama membolehkannya selagi dapat diserahkan sedangkan barang yang dirumah tidak termasuk *borg* kecuali ada penjelasannya.

3) Gadai utang

Para ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa utang tidak boleh dijadikan *borg* sebab tidak termasuk harta yang tampak. Adapun menurut Malikiyah utang boleh dijadikan *borg* sebab utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.

4) Gadai barang yang digadaikan atau dipinjam

Para ulama imam mahzab bersepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang dipinjam boleh dijadikan *borg*. Dibolehkan pula menggadaikan sawah atau ladang yang sedang diusahakan atau digarap oleh orang lain sebagai *borg*.

5) Menggadaikan barang jaminan

Pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik *rahin*. Namun demikian para ulama mahzab membolehkannya untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemiliknya.

6) Gadai Tirkah (harta peninggalan jenazah)

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membolehkan gadai dengan tirkah jika jenazah telah bebas dari utang. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat, tidak boleh menggadaikan sebagian dari harta tirkah.

7) Gadai barang yang cepat rusak

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang cepat rusak dibolehkan jika *borg* tersebut dimungkinkan akan kuat. Bila *murtahin* hendak menjemurkannya., barang tersebut harus dijemur atau segera dijual jika ditakutkannya akan rusak.

8) Menggadaikan kitab

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan yang paling masyhur dari golongan syafi'iyah membolehkan untuk menggadaikan Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits atau tafsir.

Sebaliknya, ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan Al-Qur'an tidaklah sah sebab Al-Qur'an tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi memperbolehkan menggadaikan hadits atau tafsir kepada orang kafir sekalipun apabila kitab-kitab tersebut dipegang oleh orang muslim yang adil.

D. Status dan Jenis Barang Gadai

1. Status barang gadai

Ulama fiqh menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai, dan uang yang dibutuhkan sudah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan *rahn* apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuknya saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang

yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Suatu gadai menjadi sah setelah terjadinya utang. Para ulama menilai hal tersebut sah sebab utang memang menuntut untuk pengembalian jaminan. Maka diperbolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status barang gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata “saya gadaikan barang ini kepada anda dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Karena itu merupakan jaminan bagi hak tertentu.

2. Jenis barang gadai

Jenis barang gadai (*marhum*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan uang. Menurut ulama Hanafi barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memenuhi kategori: ⁵³

- 1) Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan bah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
- 2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, arak,

⁵³ Zainudin Ali, *Hukum gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet 1, h. 26.

anjing, serta babi. Barang ini tidak diperbolehkan menurut *syara'* karena berstatus haram.

- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- 4) Barang tersebut berupa milik si *rahin*.

Menurut kesepakatan ulama fiqh menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat imam Abu Hanifah. Alasannya karena ketika akad dilakukan manfaat belum berwujud.

E. Akad Gadai

Akad berarti mengikat atau mempertemukan. Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai pertemuan *ijab* yang muncul dari salah satu pihak dengan *Qabul* dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Dalam hukum Islam hubungan antara para subyek hukum itu sangat penting dan akibat hukum juga akan menyangkut para pihak. Akibat hukum tidak hanya tercipta pada obyek, tetapi juga pada subyek, maka definisi akad menjadi pertemuan *ijab* dan *qabul* secara sah menurut ketentuan hukum syariah yang menimbulkan akibat hukum bagi subyek dan obyeknya.⁵⁴

⁵⁴ Akh Munhaji dkk, *Antologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Program Study Islam UIN Sunan Kalijaga, 2010), Cet 1, h.76.

Contoh dari akad *ijab qabul* seperti seseorang berkata seperti seseorang berkata “aku gadaikan meja ku ini denga Rp. 10.000,-“ dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai mejamu dengan Rp. 10.000,-“ atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya. Para pihak boleh membuat akad macam apapun dan berisi apa saja dalam batas-batas tidak makan harta dengan jalan *batil*, yakni tidak bertentangan dengan kaidah Islam dan ketertiban umum syar’i. Dalam hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Arinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”

Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur’an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Sedemikian tegas Al-Qur’an dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap Muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikannya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian maka rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.⁵⁵

Perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian dua pihak, yaitu orang yang berutang atau pemberi gadai dan orang yang berutang atau pemberi gadai dan

⁵⁵ Syeh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik dalam Al-Qur’an* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), Cet 1, h.73.

orang yang memberi utang atau penerima gadai. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus memenuhi akad-akad sebagaimana di jelaskan dalam ayat di atas agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn*, diantaranya sebagai berikut:

1. Akad *rahn* adalah *tabarru'*

Gadai merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Akad-akad *tabarru'* dalam konsep fiqh mu'amalah meliputi akad *hibah*, *ji'alah* (pinjam-meminjam), *wadi'ah* (titipan, *qard* dan *rahn*). Sebagai akad *tabarru'*, maka akad tersebut mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

2. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

Mayoritas *fuqaha* berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut bertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut.

3. Musnahnya barang gadai

Menurut pendapat ulama Mazhab Abu Hanifah dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.

4. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dari maksud pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

5. Pemeliharaan barang gadai

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

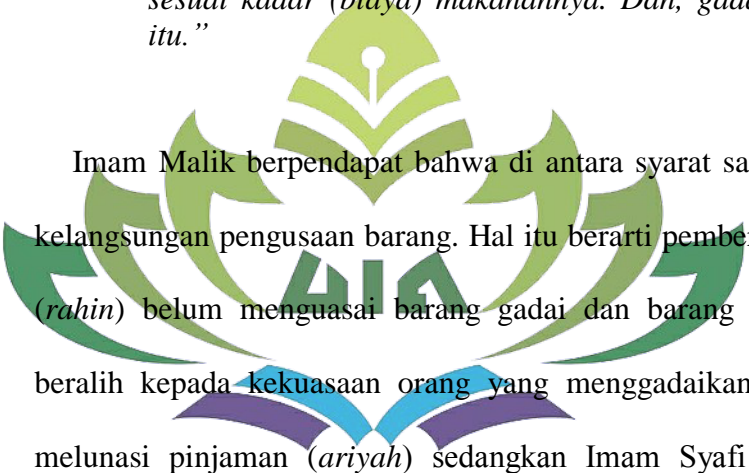
وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ

Artinya: “Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” (Qs. Al-Baqarah (2):283).⁵⁶

وَقَالَ مُخِيرَةٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : تَرَكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَفْهَا، وَتُهْلَبُ

بِقَدْرِ لَفْهَا، وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ⁵⁷

Artinya: “Mughirah berkata pada Ibrahim, “Hewan tersesat/hilang ditunggangi sesuai kadar (biaya) makanannya, diperah sesuai kadar (biaya) makanannya. Dan, gadai juga seperti itu.”



Imam Malik berpendapat bahwa di antara syarat sah gadai adalah kelangsungan penguasaan barang. Hal itu berarti pemberi barang gadai (*rahin*) belum menguasai barang gadai dan barang gadai kembali beralih kepada kekuasaan orang yang menggadaikan dengan jalan melunasi pinjaman (*ariyah*) sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai.

Ulama Hanafiyah umumnya membagi biaya-biaya ini kepada *rahin* dan *murtahin*. Pembagian tersebut yaitu:

- a. *Rahin* bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan barang gadai dan kelangsungannya karena barang gadai merupakan miliknya.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 71.

⁵⁷ Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunnan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 419.

- b. *Murtahin* bertanggung jawab atas segala biaya pengeluaran untuk menjaga atau memelihara barang gadai tersebut karena sebagai pihak penahan barang gadai, berkaitan dengan kepentingannya.

Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut, merupakan tanggung jawab *rahin* untuk memberi makan, minum hewan gadai atau upah mengembalikannya, atau biaya menyiram tanaman, penyerbukan, panen dan mengenai segala kemaslahatan tanaman, pajak, dan lain-lain.

Lain halnya tanggung jawab bagi *murtahin*, yaitu biaya pemeliharaan seperti untuk menjaga atau tempat penyimpanan barang gadai, sewa kandang hewan atau sewa gudang penyimpanan barang gadai, karena uang sewa adalah beban pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab *murtahin*. Berdasarkan hal tersebut tidak boleh disyaratkan pada akad gadai memberi upah kepada *murtahin* untuk biaya pemeliharaan barang gadai karena hal itu sudah menjadi kewajibannya. Jadi mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabila, Malikiyah berpendapat bahwa semua biaya *marhun* baik biaya perawatan maupun biaya penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*, karena *rahin* menjadi pemilik tersebut dan yang menanggung resiko ataupun menikmati hasilnya.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai sebagai akad *tabarru'* (kebajikan) bertujuan untuk menolong pihak yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan diserahkan kepada penguasanya ke tangan *murtahin* memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang. Untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun maupun penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Sebab, *rahin* yang menjadi pemilik *marhun* yang sebenarnya. Sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhun* sebagai jaminan utangnya.

F. Hukum Gadai (*Rahn*)

Hukum *Rahn* secara umum terbagi dua yaitu *shahih* dan *ghair shahih* (*fasid*). *Rahn shahih* adalah *rahn* yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan *rahn fasid* adalah *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.⁵⁸

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn ghair shahih* terbagi menjadi dua, yaitu:

- *Batal*, tidak memenuhi persyaratan pada asal akad, seperti *aqid* tidak ahli.
- *Fasid*, tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad, seperti *borg* berkaitan dengan barang lain.

⁵⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 240.

1. Hukum *Rahn Shahih/Rahn Lazim*

Kelaziman *rahn* bergantung pada *rahin* , bukan *murtahin*. *Rahn* tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sedangkan *murtahin* berhak membatalkannya kapan saja dia mau. Selain itu, menurut pandangan jumhur ulama, *rahn* baru dipandang sah bila *borg* sudah dipegang oleh *murtahin*.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah cukup dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Kemudian meminta kepada *rahin* untuk menyerahkan *borg*.

2. Hukum *Rahn Fasid*⁵⁹

Jumhur ulama fiqih sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah dan menyebabkan akad batal atau rusak, yakni tidak adanya dampak hukum pada *borg*. Dengan demikian, *murtahin* tidak memiliki hak untuk menahannya. Begitu pula *rahin* diharuskan meminta kembali *borg*. Jika *murtahin* menolak dan *borg* sampai rusak, *murtahin* dipandang sebagai perampas. Oleh karena itu harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang sama nilainya. Jika *rahin* meninggal, padahal dia berutang, *murtahin* berhak atas *rahn fasid* tersebut sebagaimana pada *rahn shahih*.

Pendapat ulama Malikiyah hampir senada dengan pendapat ulama Hanafiyah di atas, bahwa jika *rahn* didasarkan pada akad *fasid*, *murtahin* berhak atas barang dari pada orang-orang yang memiliki

⁵⁹ A.Khamedi Ja'far, *Ibid*. h.251.

piutang lainnya. Adapun jika *borg* rusak di tangan *murtahin*. Hukumnya sebagaimana pada *rahn shahih*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum akad *rahn fasid* sama dengan hukum *akad shahih* dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas *borg*. Jika pada *akad Shahih murtahin* tidak bertanggung jawab atas *borg*, apalagi akad yang tidak *shahih* jika *borg* rusak bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada akad *shahih*, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

G. Pertambahan Jaminan (Borg)

Ulama fiqih sepakat bahwa tambahan yang ada pada *borg* adalah milik *rahn*, sebab dialah pemilik aslinya untuk lebih jelas tentang pendapat mereka, perhatikan uraian berikut.⁶⁰

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tambahan yang terjadi pada *borg* yang termasuk *rahn*, baik yang berkaitan dengan *rahn*, seperti buah, susu, dan lain-lain atau yang terpisah, seperti anak hewan. Adalah tambahan yang tidak berkaitan dengan *rahn*, seperti upah merupakan milik *rahn*.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa termasuk pada *rahn* adalah sesuatu yang dihasilkannya, berkaitan dan tidak terpisah, seperti lemak, atau yang terpisah tetapi berkaitan seperti anak dan lain-lain.

⁶⁰ A.Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h.252

Adapun sesuatu yang bukan asli dari pencipta *borg*, atau gambarannya tidaklah termasuk *Borg*, seperti buah yang dihasilkan pohon atau yang tidak dihasilkan seperti sewa rumah atau penghasilannya.

Menurut ulama Syafi'iyah segala tambahan dari *rahn*, baik yang dilahirkan dari *borg* atau bukan, berkaitan dengan *borg* ataupun tidak, semuanya termasuk *rahn*.. Dengan demikian, hukuman untuk benda-benda tersebut adalah sebagaimana hukum atas *rahn* itu sendiri.

H. Penambahan Utang

Jumhur ulama membolehkan *rahn* untuk menambah *borg*, misalnya *rahn* meminjam uang Rp 100.000,- dengan menggadaikan baju, kemudian ia menambah satu baju lagi untuk gadai tersebut.

Namun demikian, di antara ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat apabila *rahn* meminta tambahan utang, seperti *rahn* meminjam uang Rp. 100.000,- dengan menggadaikan sepeda, kemudian *rahn* meminjam lagi Rp.100.000,- dengan menjadikan sebagai gadai atas uang Rp. 200.000,-.⁶¹

Menanggapi hal tersebut ada beberapa pendapat ulama Fiqih yaitu:

1. Ulama Hanafiyah, Muhammad, Hanabilah, dan suatu pendapat dari Imam Syafi'i menyatakan tidak sah menambah utang sebab dapat dianggap akad *rahi* kedua, padahal *borg* berkaitan dengan *rahn* pertama secara sempurna.
2. Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tsur, Al-Majani, dan Ibn Al-Mundzir membolehkan tambahan tersebut sebab *rahn* kedua membatalkan *rahn*

⁶¹ A.Khumi Ja'far, *Op.Cit.*, h.253.

yang pertama. Dengan demikian sama menggadaikan satu *borg* untuk dua utang.

I. Pemanfaatan Barang Gadaian Oleh Pemegang Gadai

Menyangkut pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak penggadaian, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya, bulunya. Menurut ketentuan hukum Islam mengenai pemanfaatan barang gadaian tetap merupakan hak *rahin*, termasuk hasil barang gadaian tersebut, sebab perjanjian dilkasankan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan *qirad* (ialah harta yang diberikan kepada seseorang kemudian mengembilkannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.⁶²

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُلُّ قَرْضٍ

جَزْءٌ مِّنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن أبي أسامة)⁶³

Artinya : “ dari Ali berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW: “Tiap-tiap utang yang menarik faedah, maka yaitu riba”. (HR. Harrits bin Abi Usammah).

⁶² Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),h.143

⁶³ Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunnan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, h. 249.

Orang yang punya barang berhak mengambil manfaat dari barang yang dirungguhkannya, bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, kerusakan barangnyapun atas tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat yang dirungguhkannya itu walaupun tidak seizin *murtahin*.⁶⁴ hal ini didasarkan kepada Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Khurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُخُمُّهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَاحَاكِمٌ)⁶⁵

Artinya : Dan dari padanya (Abu Hurairah) ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW : “ tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapat keuntungan dan kerugian menjadi tanggungannya .” (HR. Dhuruqutni dan Hakim)

Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si penerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau pemerah susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah si penerima gadai memelihara dan memberi makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau yang pemerah susu binatang mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu para ulama telah ijma bahwa gadai itu disyariatkan untuk

⁶⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maorom min Adilatul Ahkam* (Surabaya: Darun Nasyr Al Masyriyyah), h.176.

⁶⁵ Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunnan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, h. 420.

jaminan utang. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan *marhun* (barang gadai):

1. *Rahin* memanfaatkan *marhun*

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan itu dibatasi oleh *habsu* (hak menahan *marhun*) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Pendapat ulama mazhab tentang pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai.⁶⁶

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang itu hanya semata sangkut-paut dengan utang untuk pembayaran utang itu dengan dijual apabila utang tidak dibayar dan orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat dari barang itu dengan cara apapun. Ia juga tidak boleh melakukan suatu tindakan menganiaya kecuali dengan izin yang pegang gadai.
- c. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Ibn Abi Laila dan Ibnu I'-mudzir berpendapat bahwa orang yang menggadaikan masih berhak menyewakannya atau meminjamkannya untuk masa yang

⁶⁶ Syaikh Mahmoud syaltout dan Syaikh M.AliAs-Sayis, *Alih Bahasa Ismuha, Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1973), Cet 8, h.309-310.

tidak melebihi waktu perjanjian pembayaran utang itu. Ia juga berhak bertindak dengan sesuatu tindakan yang tidak mengurangi barang itu atau mengeluarkan dari hak miliknya.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat dipahami bahwa para ulama hanya berpendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai, yaitu pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu dalam akad gadai *rahn* tetap memiliki hak milik atas *marhun*, sedangkan *murtahin* memiliki harta menahan *marhun* sebagaimana jaminan pelunasan utang. Dengan demikian pemanfaatan *rahn* atas *marhun* digantungkan atas izin dari *murtahin*. Jadi, ketika *murtahin* mengizinkan dan menganggap pemanfaatan yang dilakukan oleh *rahn* tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari *marhun*, maka yang dilakukan *rahn* tersebut diperbolehkan menurut syara'.

2. *Murtahin* memanfaatkan *marhun*

Apabila *rahn* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak berhak menahan *marhun* untuk jaminan utang *rahn*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan ulama disyaratkan adanya *rahn* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Pada kondisi ini, *marhun* berada di tangan *murtahin* hanya berhak menahan, tetapi bukan memilikinya.

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat dalam mengenai pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *rahin*. Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin*, maka ia menanggung seluruh nilai dari apa yang dilakukannya itu, dan status hukumnya seperti orang yang mengambil milik orang lain dengan paksaan (*Ghasab*). Namun bila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua pendapat, yaitu membolehkannya secara mutlak dan mensyaratkannya sebagai salah satu syarat tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّ قَرْضٍ جَزَّ مَنَفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا (رواه الحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ)⁶⁷

Artinya : “ dari Ali berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW:

“Tiap-tiap utang yang menarik faedah, maka yaitu *riba*”. (HR. Harrits bin Abi Usammah).

b. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah pemanfaatan atas *marhun* ini harus dipisahkan antara benda mati dan benda hisup. Kalau *marhun* berupa barang-barang yang tidak perlu biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan dan lainnya, maka

⁶⁷ Ibnu Hajar Al-Aqalani, *Terjemah Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*, Cet-2 (Jakarta : Pustaka Amani, 1996) h. 337.

murthin dilarang oleh hukum Islam memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*. Namun apabila ada izin dari *rahin* mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun*, diperbolehkan menurut ulama Hanabilah. Menurut ulama Hanabilah persyaratan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* ketika akad gadai dilaksanakan, merupakan syarat *fasid* yang tidak sesuai dengan tujuan *rahn* sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong-menolong.

c. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penerima harta gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukan pada dirinya.
- 3) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

Pendapat di atas, berdasarkan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَمْلُوكٌ

“Boleh menunggang dan memerah susu hewan yang digadaikan”

d. Pendapat Ulama Syafi’iyah

Ulama Syafi’iyah secara umum sama berpendapat sama seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak diperbolehkan.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُثْمُهُ وَعَلِيهِ غُرْمُهُ

Artinya: “*barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya dan hasilnya*”

Adapun hukum mengambil manfaat barang gadaian oleh pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui, bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama. Hanya yang timbul dengan sebab akad itu ialah hak menahan atau mengkhususkan menurut kedua pendapat. Berdasarkan ini terjadilah *Ijma* mereka bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah milik orang yang menggadaikan dan yang pegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu setidaknya selama yang menggadaikannya tidak mengizinkannya untuknya dan barang yang digadaikan itu tidak dapat ditunggangi atau diperah, maka hal ini ada perinci dan perbedaan pendapat para ulama.

Adapun apabila tidak diizinkan oleh yang menggadaikan sedang barang gadai itu adalah barang yang dapat dikendarai atau diperah, maka jumhur ulama berpendapat bahwa itu sama sekali tidak dapat diambil manfaat oleh pemegang gadai.

Syara' telah menetapkan baik hasil maupun rugi adalah untuk menggadaikan, maka yang pegang gadai tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin yang menggadaikan. Mereka itu mengatakan para ulama telah sepakat bahwa yang dipegang gadai tidak memiliki barang gadaian, maka dia dan orang lain adalah sama.⁶⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat ulama di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan atas barang gadai itu merupakan suatu tuntutan syara' dalam memelihara manfaat dan nilai dari barang gadai. Hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang boleh memanfaatkannya. Pihak *rahin* dan *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan, perawatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keutuhan barang gadai walaupun tanpa seizin *rahin*.

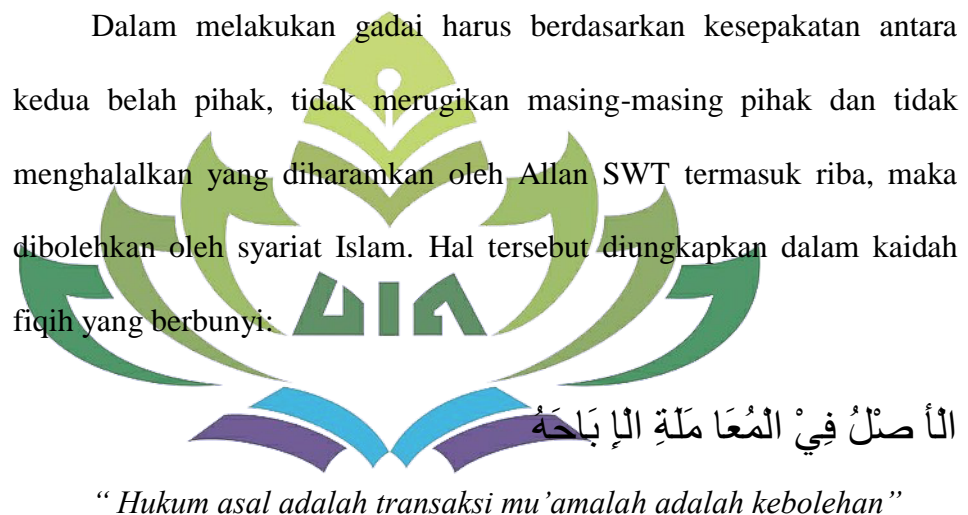
Begitu juga *rahin* dapat memanfaatkan barang yang ia gadaikan apabila ia yang menanggung biaya perawatan, pemeliharaan, dan lain-lain walupun tanpa seizin *murtahin*. Namun, pemanfaatan yang melebihi

⁶⁸ Syaikh Mahmoud syaltout dan Syaikh M.AliAs-Sayis, *Op.Cit.*, h.312.

biaya-biaya yang dikeluarkan harus ada kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*.

Oleh karena akad dalam perjanjian gadai adalah, *rahin* sebagai pemilik barang, sedangkan *murtahin* sebagai yang mempunyai hak menahan barang sampai utang *rahin* dilunasinya. Dalam hal ini perlunya ada kesepakatan antara kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan untuk meninggalkan hal yang berbentuk riba.

Dalam melakukan gadai harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak merugikan masing-masing pihak dan tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT termasuk riba, maka dibolehkan oleh syariat Islam. Hal tersebut diungkapkan dalam kaidah fiqih yang berbunyi:



J. Hak dan Kewajiban Para Pihak Penerima Gadai.

Menurut Abdul Aziz Dahlan pihak *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi.⁶⁹ Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

a. Hak Pemegang Gadai

⁶⁹ Adrian Sutedi, *Hukum gadai Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h.62.

- 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban Pemegang Gadai

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2) Pemegang gadai tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri dan pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Berikut adalah hak dan Kewajiban pemberi gadai :⁷⁰

a. Hak Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.

⁷⁰ *Ibid.* h.68.

- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi pelunasan biaya *marhun bih*, dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalah gunakan *marhun*.

b. Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

K. Musnah dan Berakhirnya Barang Gadaian

1. Musnahnya Barang Gadai

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan atau musnahnya barang gadai. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Sur, dan kebanyakan ahli hadits, menyatakan bahwa

pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungannya.

Imam Abu Hanifah dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasan mereka adalah bahwa barang tersebut merupakan jaminan atas utang, sehingga apabila barang itu musnah, kewajiban melunasi utang juga menjadi hilang atau rusak, adalah harga terendah atau dengan harga uang. Tapi ada juga yang berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya.⁷¹

2. Berakhirnya Barang Gadaian

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar utang dan lain-lain yang akan dijelaskan dibawah ini:⁷²

a. *Borg* diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *borg* kepada kepemilikannya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang. Jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. selain itu, dipandang abis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahn* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

b. Dipaksa Menjual *Borg*

Rahn habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

⁷¹ Faturrahman djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar grafika, 2013), Cet 2, h. 242.

⁷² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, h. 208.

c. *Rahin* Melunasi Semua Utang

d. Pembebasan utang

Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meski utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

e. Pembatalan *Rahn* dari Pihak *Murtahin*

Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* pada *rahin* sampai dijual.

f. *Rahin* Meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*, juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

g. *Borg* rusak

h. *Tasharruf* dan *borg*

Rahn dipandang habis apabila *borg* di *tasharruf* kan, seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

Adapun berakhirnya akad *rahn*, menurut Wahbah Az-Zuahili dikarenakan hal berikut:⁷³

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* (penggadai) membayar utangnya.
- c. Pembebasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- d. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

Dalam KUH Perdata Pasal 1152 hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila barang itu hilang dari tangan penerima gadai ini atau dari padanya, maka hendaklah ia menuntutnya kembali, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.⁷⁴

⁷³ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh*, Jilid VI, h.183.

⁷⁴ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta:Pradnya Paramita,2009), Cet 40, h.297-298.

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Cangu Kecamatan Kalianda

Asal kata Cangu berasal dari nama sebuah kayu, pada mulanya warga Cangu berasal dari daerah pesisir Krui Lampung Barat. Nama Cangu tersebut disematkan oleh beberapa orang yang menyusuri daerah Pesisir Pantai dan tiba di Way Urang, tepatnya di Taman Pendidikan Seni Baca Al Qur'an (sekarang Hotel Kalianda).

Beberapa waktu mereka tinggal disana, dikarenakan pada waktu itu masyarakat masih awam, jadi apa bila ada penduduk pendatang diusir dan dikucilkan oleh penduduk asli. Dan karena mereka diusir terjadilah perselisihan antara mereka yang intinya penduduk pendatang tidak boleh / diizinkan nikah ataupun mengawini dengan penduduk asli, oleh sebab itu warga Cangu Asli pun tidak bisa menikahkan penduduk asli (Warga Way Urang).

Setelah adanya perselisihan itu, penduduk pendatang berpindah tempat, yaitu dibelakang kantor Camat kalianda dulu (sekarang Kantor UPT Pendidikan /samping SMA Pembangunan). Disana mereka tak berlangsung lama, mereka pindah lagi ke daerah yang baru , yang mereka tempati sekitar 300 meter dari desa Cangu sekarang (Pekon Saka), ditempat itu pun tidak lama, kemudian merekapun pindah ketempat yang sekarang yang mereka tetapkan bernama CANGGU yang diambil dari tempat asal mereka.

Desa Cangu secara definitive berdiri pada tahun 1960, seiring perkembangan, Desa Cangu telah dipimpin oleh beberapa orang Kepala Desa, yaitu :

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1960-1967	RAJA BAGINDA	Kepala Desa Pertama
2	1967-1974	A. RONI	Kepala Desa Kedua
3	1974-1988	MAKMUN HK	Kepala Desa Ketiga
4	1988-1999	M. TAHIR. HN	Kepala Desa Keempat
5	1999 s.d sekarang	IMRON HERWANDI	Kepala Desa Kelima

2. Kondisi Geografis Desa Cangu

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Cangu merupakan salah satu Desa dari 25 Desa dan 4 Kelurahan yang ada di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai luas 1127 Ha, dengan batas-batas wilayah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan, Desa Sukatani dan Sidomakmur
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan, Kesugihan
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan, Desa Hara Banjar Manis
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan, Desa Tajimalela

b. Iklim

Iklim Desa Cangu, seperti halnya Desa-Desa lain di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola bercocok tanam yang ada di Desa Cangu Kecamatan Kalianda.

3. Kondisi Pemerintah Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Cangu mempunyai luas wilayah 1.117 Ha, terbagi dalam 7 Dusun yang terdiri dari 18 Rukun Tetangga (RT).

Adapun pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Pembagian Wilayah

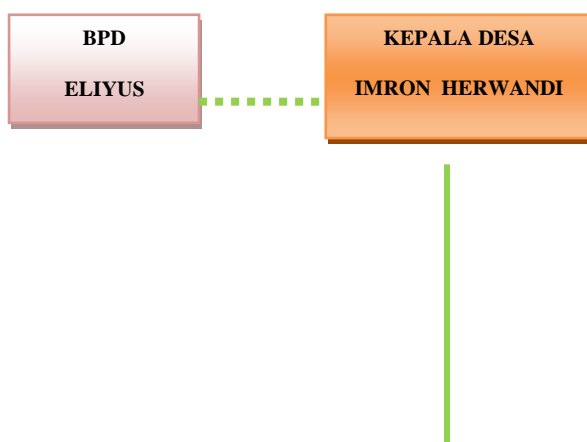
No	Dusun	Nama Kadus / RT	Jumlah KK / jiwa
1	Dusun I	HASAN BASRIE	151 kk/576 jiwa
	RT 01	ARIFIN	82 kk/311 jiwa
	RT 02	HERDIN YUSU	69 kk/265 jiwa
2	Dusun II	KHORUN AMALA	101 kk/360 jiwa
	RT 03	SAHRUL	29 kk/120 jiwa
	RT 04	SYAFE'I RAHMAN	37 kk/111 jiwa

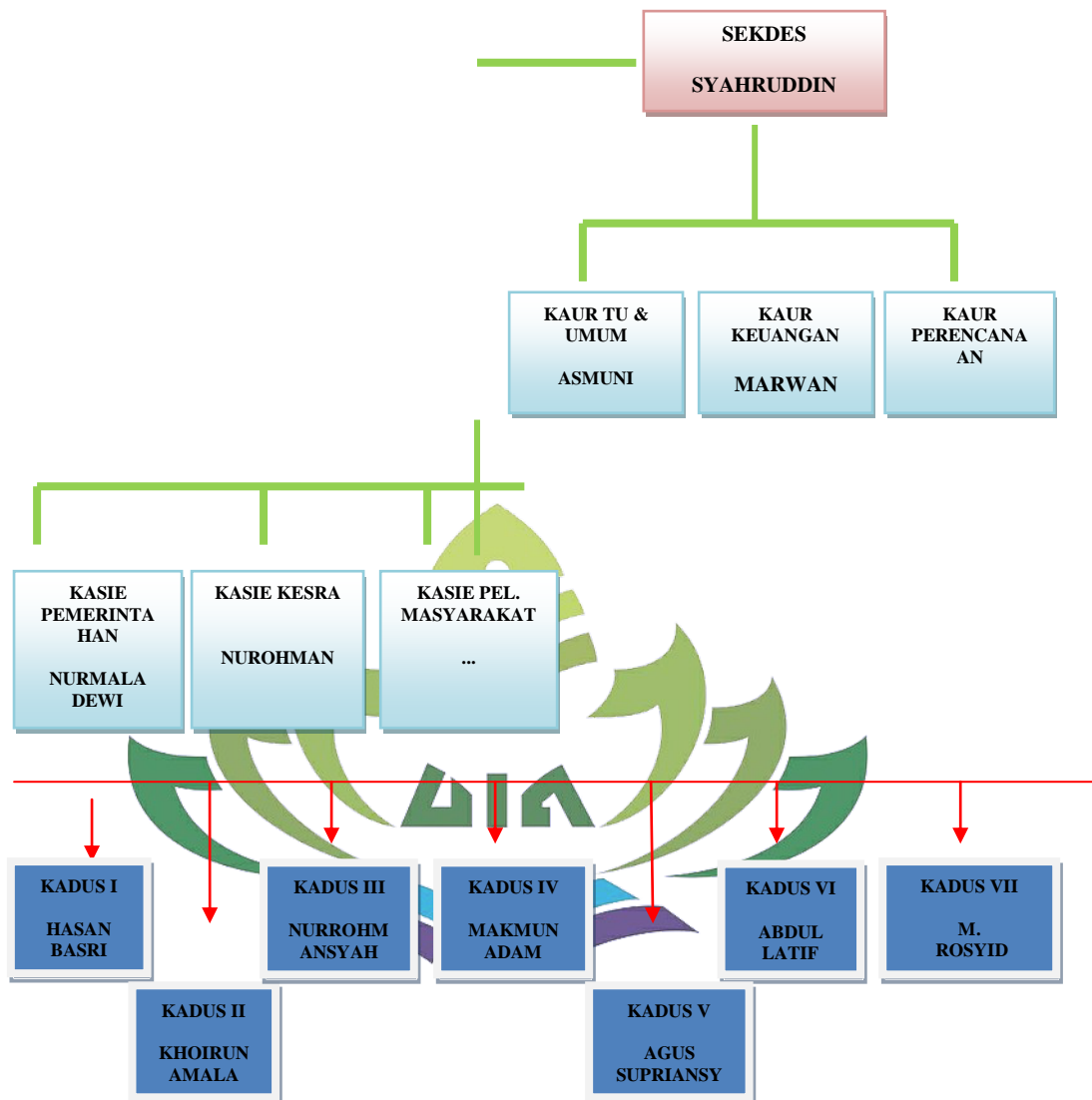
	RT 05	M. NASIR	35 kk/129 jiwa
3	Dusun III	NUROHMANSYAH	90 kk/358 jiwa
	RT 06	YUSMARONI	38 kk/159 jiwa
	RT 07	HUSIN	52 kk/199 jiwa
4	Dusun IV	MAKMUN ADAM	95 kk/347 jiwa
	RT 08	SAHDAN APANDI	42 kk/167 jiwa
	RT 09	SUPRIANTO	53 kk/180 jiwa
5	Dusun V	AGUS SUPRIANSYAH	139 kk/557 jiwa
	RT 10	YUDIANTO	41 kk/187 jiwa
	RT 11	MURLISIN	53 kk/191 jiwa
	RT 12	SAWAL	45 kk/179 jiwa
6	Dusun VI	ABDUL LATIF	135 kk/453 jiwa
	RT 13	SOLIHIN RATAI	42 kk/ 152 jiwa
	RT 14	SOLIHIN	40 kk/ 148 jiwa
	RT 15	MANSUR	53 kk/153 jiwa
7	Dusun VII	M. ROSYID	129 kk/449 jiwa
	RT 16	HASANNUDIN	46 kk/ 144 jiwa
	RT 17	ARIPIN	44 kk/156 jiwa
	RT 18	HERWAN	39 k/ 149 jiwa

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Cangu





4. Keadaan Sosial Desa Cangu

a. Jumlah Penduduk Desa Cangu

Desa Cangu mempunyai jumlah penduduk 3100 jiwa (Laki-laki berjumlah 1590 jiwa dan Perempuan berjumlah 1510 jiwa), berdasarkan data penduduk tahun 2017, yang tersebar dalam 7 Dusun dengan rincian sebagaimana tabel :

Tabel 3. Jumlah Penduduk

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Dusun VI	Dusun VII
576 Orang	360 Orang	358 Orang	347 Orang	557 Orang	453 Orang	449 Orang

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Canggü adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Tingkat Pendidikan

No	Jenjang pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	456 Orang
2	Belum tamat SD	540 Orang
3	Tidak tamat SD	775 Orang
4	Tamat SD	700 Orang
5	Tamat SLTP	872 Orang
6	Tamat SLTA	469 Orang
7	Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	70 Orang

Tabel 4. Lembaga Pendidikan

No	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),	-	Dusun III	Baik

2	SD	SDN 1 Canggu	Dusun II	Baik
3	SD	SDN 2 Canggu	Dusun III	Baik
4	SD	SDN 3 Canggu	Dusun VII	Baik
5	SMP	SMP Satu Atap	Dusun VII	Baik
5	TPA	TPA	Dusun VII	Baik

c. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Canggu secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Prasarana Desa

No	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Sarana Ibadah		
	a. Masjid / Mushola	7	
	b. Sarana ibadah lainnya		
2	Sarana Pendidikan		
	a. SD / MI	3	Di Dusun 1,4 dan 7
	b. Pondok Pesantren	1	
3	Sarana Kesehatan		
	a. Polindes		
	b. Posyandu	3	Di Dusun 5 & 7
4	Sarana Pemerintahan		
	a. Balai Desa	1	

	b. Kantor Desa	1	
5	Sarana Keamanan		
	a. Poskamling	7	Swadaya
6	Sarana Transportasi		
	a. Jalan Dusun	5	
	b. Jalan Desa	1	
	c. Jembatan	5	
7	Sarana Olah Raga		
	a. Lapangan Bola Kaki		
	b. Lapangan Bola Volly	1	Dusun 5

5. Keadaan Ekonomi Penduduk

a. Mata Pencaharian Penduduk

Karena Desa Cangu sebagian besar merupakan daerah pertanian dan perkebunan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk

Petani	300 Orang
Pedagang	110 Orang
Swasta	35 Orang
PNS	60 Orang
Tukang	37 Orang
Bidan/Perawat	12 Orang

TNI/POLRI	15 Orang
Pensiunan	10 Orang
Buruh	120 Orang
Supir	30 Orang
Jasa Persewaan	7 Orang

b. Gambaran Umum Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Sektor	Jenis	Volume/luas/jumlah
Pertanian	- Padi sawah	- 200 hektare
	- Padi ladang	- 129 hektare
	- Jagung	- 250 hektare
	- Palawija	- 30 hektare
	- Kakao/cokelat	- 200 hektare
	- Kelapa	- 300 hektare
	- Kopi	- 5 hektare
	- Singkong	- 2 hektare
Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Kambing - Sapi - Kerbau - Ayam 	<ul style="list-style-type: none"> - 170 ekor - 115 ekor - 11 ekor - 1500 ekor

Perikanan	- Ikan air tawar	- 2 hektare
-----------	------------------	-------------

6. Data Pendukung Lainnya

a. Luas Wilayah Pekon

1	Pemukiman	150 Ha
2	Pertanian Sawah	300 Ha
3	Ladang / tegalan	129 Ha
4	Perkebunan	538 Ha
5	Tanah Pekuburan	10 Ha
5	Hutan	- Ha
5	Rawa-rawa	- Ha
6	Perkantoran	$\frac{1}{4}$ Ha
7	Sekolah	2 Ha
8	Jalan	Ha
9	Lapangan Sepak Bola	Ha

Orbitasi:

1. Jarak Ke Ibukota Kecamatan Terdekat : 2 Km
2. Lama Jarak Tempuh Ke ibukota Kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 2,5 Km
4. Lama Jarak Tempuh ke Ibukota Kabupaten : 20 Menit

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 7. Jumlah penduduk tiap Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
					L	P	Total
1	Sabah Kering	2	1	151	291	285	576
2	Kubang Balak	3	1	101	183	177	360
3	Sumur Batu	3	1	90	193	165	358
4	Kubu Panglima	3	1	95	178	169	347
5	Canggu Tengah	2	1	139	292	265	557
6	Suka Jadi	3	1	135	229	224	453
7	Suka Damai	2	1	129	224	225	449
Jumlah		18	7	840 kk	1590	1510	3100

b. Kesehatan

Tabel 8. Kesehatan

1) Kematian Bayi	
a) Jumlah Bayi Lahir Pada Tahun Ini	101 Orang
b) Jumlah Bayi Meninggal Tahun Ini	2 Oramg
2) Kematian Ibu Melahirkan	
a) Jumlah Ibu Melahirkan	101 Orang
b) Jumlah Ibu Melahirksn Meninggal Tahun Ini	-

3) Cakupan Imunisasi	
a) Cakupan Imunisasi Polio	160 Orang
b) Cakupan Imunisasi Cacar	120 Orang
4) Balita	
a) Balita Laki-Laki	20 Orang
b) Balita Perempuan	32 Orang
5) Penemuan Air Bersih	
a) Penggunaan Sumur Galian	700 KK
b) Penggunaan Air PAM	-
c) Penggunaan Sumur POM	20 KK
d) Penggunaan Sumur Hidran	-

c. Keagamaan

Data keagamaan Desa Cangu Tahun 2017, jumlah pemeluk :

- 1) Islam : 3772 Orang
- 2) Katolik : 15 Orang
- 3) Kristen : 15 Orang
- 4) Hindu : -
- 5) Budha : -

d. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

Tabel 8. Lembaga Kemasyarakatan

No	Nama Lembaga	Jumlah
----	--------------	--------

1	LPM	1
2	PKK	1
3	Posyandu	7
4	Pengajian	2
5	Arisan	1
6	Simpan Pinjam	4
7	Kelompok Tani	5
8	Gapoktan	1
9	Karang Taruna	1
10	Risma	4
11	Ormas	1
12	Lain-lain	-

B. Pelaksanaan Gadai dalam Masyarakat Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Masyarakat Desa Cangu merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan sektor pertanian, persawahan, perkebunan dan lain-lain. Terjadinya gadai pada masyarakat Desa Cangu biasanya karena faktor ekonomi yang tidak stabil. Dengan demikian jika pihak penggadai membutuhkan pinjaman uang, maka penggadai langsung menemui *murtahin*.

Praktik gadai di Desa Cangu sudah biasa dilakukan, namun seringkali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit. Bahkan terkadang terpaksa

meminjam uang kepada orang lain, meskipun harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut akan tetapi sebagian besar praktik gadai ini dilakukan dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yaitu mengenai Praktik gadai mobil yang terdapat tiga pihak, pihak pertama (*Rahn*) pihak kedua (*Murtahin*) dan pihak ketiga (intansi/lembaga *leasing*), dalam praktik gadai ini dengan memberikan jaminan satu unit mobil kepada *murtahin* yang dimana mobil tersebut masih dalam kreditan atau barang yang masih dalam jaminan pihak *leasing* atas pinjaman uang yang dilakukan oleh *rahin*. Akibat faktor ekonomi yang tidak stabil yang menyebabkan *Rahn* menggadaikan mobil tersebut yang masih dalam keadaan kredit dan menunggak angsurannya.

Didalam praktik mobil kreditan yang terjadi di Desa Cangu sebelum sahnya suatu transaksi tersebut maka diadakannya akad terlebih dahulu yang dimana akad dalam transaksi tersebut pihak pertama tidak terus terang dan masih ada dokumen-dokumen yang tidak dijelaskan kepada *murtahin* atau adanya rukun dan syarat-syarat dalam akad tersebut yang masih disembunyikan, sehingga dengan demikian hal tersebut rentang timbulnya sengketa yang dimana sebelum jatuh tempo pemakaian oleh *murtahin* itu habis mobil sudah ditarik oleh pihak *leasing* dengan alasan mobil ini masih dalam angsuran yang menunggak.

Praktek gadai responden pertama yaitu Bapak Ali sebagai pihak *rahin* yang menggadaikan satu unit mobil xenia 2014 Bapak mukhlisin sebagai *murtahin* dengan jumlah uang sebesar 25 juta dan memberikan berkas STNK serta mempunyai masa tenggang selama dua bulan, perjanjian dilakukan secara tertulis dalam kwitansi di atas materai 6000 yang disaksikan oleh istrinya Ibu Marliyana, tidak disaksikan oleh orang lain dan dalam perjanjian tersebut *murtahin* sudah mengetahui bahwa mobil tersebut menunggak angsurannya sebab *rahin* mengatakan dengan jujur dan alasan *rahin* meminjam uang ini juga sebagai pembayaran angsuran yang menunggak tersebut sehingga *murtahin* mempercayainya akan tetapi sudah berjalannya waktu dan sebelum jatuh tempo berakhir mobil sekitaran satu bulan lebih mobil tersebut di tangan *rahin* ketika *rahin* pergi ke Lampung Utara yaitu di daerah Way Kanan (Baradatu) bersama keluarga kemudian diberhentikan oleh kolektor yang sudah bekerjasama dengan *leasing* dengan alasan bahwa angsuran ini menunggak selama 6 bulan, kemudian *rahin* mengembalikan uang yang dipinjam tersebut sebanyak 15 juta dan sisa 10 juta belum dibayar hingga saat ini.

Praktek gadai pada responden kedua yaitu Bapak Syahri selaku *rahin* yang menggadaikan satu unit mobil Avanza Putih tahun 2015 kepada Bapak Hendri sebagai pihak *Murtahin* , dengan jumlah uang sebesar 35 juta, memberikan berkas STNK dan tidak mempunyai masa tenggang dengan adanya tanda bukti berupa kwitansi di atas materai 6000 yang disaksikan oleh istrinya Ibu Diana, tidak disaksikan oleh orang lain, didalam perjanjian

tersebut *murtahin* sudah mengetahui bahwa mobil tersebut masih dalam kredit akan tetapi pihak *rahin* tidak memberitahukan bahwa mobil tersebut menunggak angsurannya sebab ketika *murtahin* menanyakan bukti setoran terakhir mobil tersebut, pihak *rahin* menolaknya dengan alasan bukti setoran terakhir dibawa oleh temannya sebab disaat penyeteroran kemarin lalu dia menyeter angsuran melalui temannya tersebut. Dengan alasan seperti itu *murtahin* menyetujuinya dan terjadilah transaksi gadai tersebut akan tetapi pada saat satu bulan mobil di tangan *murtahin* si *rahin* meminjam mobil tersebut untuk sehari saja kemudian *murtahin* mengizinkan, sehingga pada esok harinya *rahin* datang kerumah *murtahin* tidak membawa mobil gadaian tersebut sebab ketika mobil itu berada di rumah *rahin* mobil tersebut ditarik oleh *leasing* dengan alasan mobil tersebut menunggak.

Responden ketiga yaitu Bapak Samsul selaku *rahin* yang menggadaikan satu unit mobil Avanza tahun 2016 kepada Bapak Bustomi yang didalam jumlah uang gadai ini sebanyak 30 juta lalu *rahin* ini meminjam uang lagi untuk modal usaha kue sejumlah 20 juta. Kemudian Bapak Bustomi menyetujui perjanjian tersebut dengan adanya tanda bukti berupa kwitansi secara tertulis di atas materai 6000, tenggang waktu selama empat bulan, dan *rahin* memberikan STNK serta disaksikan oleh kerabat dekat bapak Bustomi. Selama 1 (satu) bulan 2 (bulan) sistem bagi hasil itu berjalan lancar pada saat bulan ketiga *rahin* tidak memberikan setoran bagi hasil atas usaha kue tersebut, kemudian sudah beberapa kali *murtahin* menemui *rahin* akan tetapi *rahin* masih tidak ada dirumah, dari pernyataan

tetangnya bawah rumah tersebut bukan miliki pak Samsul (*rahin*) akan tetapi itu rumah kontrakan, kemudian tidak lama itu mobil yang sebagai jaminan gadai tersebut ditarik oleh *leasing* dengan alasan menunggak angsuran selama 3 bulan sebab mobil ini masih dalam keadaan mobil baru, yang diangsur baru satu kali angsuran saja. Sampai sekarang pak Samsul tersebut membawa kabur uang pak bustomi.

Setelah melakukan wawancara terhadap para responden ternyata mereka belum memahami proses gadai dalam hukum Islam. tata cara yang mereka lakukan hanya mengikuti tata cara masyarakat setempat dan langsung menyetujui perjanjian, para responden tidak memerhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam, para masyarakat hanya mengikuti rasa kepercayaan sesama masyarakat saja sehingga dengan praktek gadai tersebut pihak *murtahin* merasa dirugikan dan itu jumlahnya atau nominalnya tidak sedikit.



BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik Gadai Mobil Kreditan di Desa Cangu Kecamatan Kalianda

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara dan dokumentasi, beserta data kepustakaan baik diperoleh langsung dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang berjudul “Praktik Transaksi Gadai Mobil Kreditan di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan”, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Praktik gadai yang dilaksanakan di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan adalah pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh *Rahin* dan *Murtahin* dengan melaksanakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa telah terjadinya utang piutang diantara keduanya dengan jaminan mobil yang diserahkan oleh *Rahin* kepada

Murtahin, dan disepakati oleh keduanya dengan alasan sebagai bukti kuat bahwa *rahin* akan melunasi utangnya.

Praktik gadai mobil yang terjadi pada masyarakat di Desa Cangu dengan memberikan jaminan satu unit mobil kepada *murtahin* yang dimana mobil tersebut masih dalam kreditan dan ada juga mobil yang masih dalam jaminan pihak *leaisng* atas pinjaman uang/utang yang dilakukan oleh *rahn*. Akibat faktor ekonomi yang tidak stabil yang menyebabkan *Rahn* menggadaikan mobil tersebut yang masih dalam keadaan kredit dan menunggak angsurannya sehingga tidak sampai waktu jatuh tempo yang telah disepakati, mobil tersebut ditarik oleh pihak *leasing*.

Salah satu yang harus dipenuhi dalam perjanjian adanya pihak yang melakukan persetujuan, harus memenuhi isi perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cangu Kecamatan Kalianda bahwa *rahin* dan *murtahin* tidak membuat surat perjanjian pinjam meminjam yang berbentuk tulisan, yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah perjanjian secara lisan dan adapun mengenai saksi yaitu dari salah satu pihak keluarga *murtahin* (istri). Praktik perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan cara menyerahkan secara langsung sejumlah uang pinjaman beserta menyebutkan jenis kendaraan berupa barang yang memang ada saat melakukan perjanjian sebagai jaminan dan menyerahkan STNK mobil sebagai jaminan tersebut, serta adanya tanda bukti transaksi yang berupa kwitansi yang isinya pernyataan bahwa terjadinya transaksi gadai serta berisi jumlah utang yang

dimana bukti tersebut di tanda tangani di atas materai 6000, dalam transaksi tersebut *murtahin* mengetahui bahwa mobil yang dijadikan jaminan tersebut masih dalam kredit akan tetapi *rahin* tidak memberi tahu bahwa mobil tersebut menunggak angsurannya sehingga sebelum jatuh tempo berakhir mobil tersebut ditarik oleh pihak *leasing*, dan dalam akad tersebut tidak adanya permintaan izin untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut akan tetapi setelah transaksi gadai itu resmi pihak *murtahin* mengambil manfaat dari jaminan tersebut yang sebelumnya dalam perjanjian tidak disebutkan. dan mengenai beberapa kasus yang terdapat dalam BAB III tidak hanya melakukan transaksi gadai saja akan tetapi adanya penambahan utang yang alasannya dengan utang itu untuk memulai usaha baru yaitu toko kue, mengenai permasalahan tersebut yang merasa dirugikan yaitu *murtahin*, adapun mengenai utang yang telah disepakati sebelumnya ada pihak *rahin* yang sudah membayar lunas dan ada juga sedang 50 % pembayaran, bahkan ada juga *rahin* yang tidak membayar utang tersebut,(*rahin* melakukan penipuan terhadap *murtahin*).

Pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat masih banyak yang belum memahami gadai yang sebenarnya yaitu gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Paraktik Gadai Mobil Kreditan di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah penulis menganalisa suatu permasalahan yang terjadi di Desa Cangu Kecamatan Kalianda tersebut tentang praktik gadai mobil kreditan terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Praktik Gadai Mobil Kreditan di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah data terkumpul dari permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat di Desa Cangu Kecamatan Kalianda maka penulis dapat menarik beberapa praktik gadai yang penulis temukan saat melakukan wawancara dan meninjau langsung ke lapangan di tempat penulis melakukan ini pada dasarnya seluruh kasus yang penulis temukan telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut syara' diantaranya:

1. Lafadz yaitu pernyataan perjanjian gadai yang dapat dikatakan dengan cara tertulis maupun dengan secara lisan.
2. Pemberi dan penerima gadai baik pembeli maupun penerima barang gadai haruslah merupakan seseorang yang berakal dan telah *akil baligh* sehingga dianggap telah melakukan perbuatan hukum sesuai dengan syariat Islam.
3. Barang yang digadaikan haruslah ada pada saat perjanjian gadai dilakukan dan barang gadai itu milik pemberi gadai (*rahin*), dan barang gadaian itu haruslah berada dibawah pengawasan penerima gadai.
4. Adanya utang yang bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

Namun yang menjadi persoalan adalah akad dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cangu Kecamatan Kalianda Lampung Selatan yang dimana bahwa pelaksanaan akad disyaratkan antara lain:

1. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
2. Barang yang diajdikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

Dari seluruh praktik gadai yang penulis temukan juga ketika melakukan akad itu tidak ditulis dan hanya dipersaksikan oleh salah satu keluarga saja (istri), padahal Allah sangat menganjurkan agar akad utang piutang tersebut ditulis. Dengan menyebutkan keduanya, tanggal serta perjanjian pengembalian yang menyertainya, penulisan tersebut dianjurkan lagi untuk dipersaksikan kepada orang lain, agar apabila terjadi kesalahan dikemudian hari ada saksi yang meluruskan, dan tentunya saksi tersebut harus adil. Dalam penerapannya saat ini, penulisan tersebut dikuatkan pula dengan materai agar mempunyai kekuatan hukum, atau bahkan disahkan melalui notaris.

Selain itu pula, Allah juga menganjurkan (*sunnah*) untuk memberikan barang yang bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan (gadai) bagi si pemberi pinjaman. Kemudian dituliskan segala kesepakatan yang diambil sebelum melakukan pinjam meminjam dengan gadai. Barang yang dijadikan sebagai jaminan.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ
 الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
 ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Baqarah:283)

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa dalam suatu perjanjian harus dibuat surat perjanjian tertulis, sehingga rukun dan syarat dalam akad terpenuhi. Karena akad dalam transaksi gadai sangatlah penting dan menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh *Rahin* dan *Murtahin*, apabila akadnya saja telah salah maka bisa dipastikan praktik gadai tersebut akan merugikan salah satu antara *rahin* atau tidak menutup kemungkinan *Murtahin* yang dirugikan.

Kemudian dari seluruh praktik gadai tersebut penulis temukan bahwa *murtahin* telah memanfaatkan barang jaminan tersebut yang dalam akad sebelumnya tidak disebutkan atau pihak *murtahin* tidak meminta izin terlebih dahulu mengenai pemanfaatan barang jaminan, sehingga selama *Marhun* itu di tangan *murtahin*, *murtahin* mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan utang tersebut.

Gadai dalam Hukum Islam Posisi *murtahin* hanyalah berhak menahan tidak memanfaatkan *Marhum* tersebut, mengenai pemanfaatan barang gadai ini masih dalam perdebatan para ulama ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. akan tetapi jumhur ulama berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW yang bunyinya:

عُرْمٌ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ

“barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya dan hasilnya”

Berdasarkan hadits ini syara' telah menetapkan baik hasil maupun rugi adalah untuk yang menggadaikan, maka yang pegang gadai tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin yang menggadaikan. Berdasarkan hadits tersebut mengenai perjanjian waktu dilakukan masyarakat Desa Canggü tidak meminta izin terlebih dahulu atas pemanfaatan barang gadai. Sehingga pihak *murtahin* tidak memenuhi akad tersebut. Telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”
(QS. Al-Maidah ayat 1)

Perintah ayat di atas menunjukan betapa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk apapun sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajiban memenuhi akad sehingga

setiap muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikan. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat agar tidak adanya perselisihan dan kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Masyarakat di Desa Cangu melaksanakan praktik gadai tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, karena banyaknya faktor ekonomi dan minimnya tingkat pendidikan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai yang Berupa Barang Utang yang terjadi di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* baik yang berkenaan dengan aspek ibadah maupun mu'amalah dalam hal membuat akad ada yang sudah sah dan yang belum memenuhi syarat, sehingga menjadi rusak. Sebab akad yang sah adalah yang memenuhi syarat dan rukun yang terkandung dalam akad tersebut.

Sebagaimana yang sudah penulis jabarkan sebelumnya pada Bab II mengenai rukun dan syarat dalam gadai bahwa yang dijadikan obyek gadai tersebut haruslah milik sah *rahin*, tidak ada hak orang lain dalam obyek itu.

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama *Syafi'iyah* barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat:

- a. Bukan utang, karena barang utangan itu tidak dapat digadaikan,

- b. Penetapan pemilikan atas barang atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba masa pelunasan masa gadai.

Secara kasat mata praktik gadai dikalangan masyarakat Desa Cangu Kecamatan Kalianda Lampung Selatan ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai dalam syariat Islam. Barang yang menjadi jaminan secara hukum sah dan halal untuk digadaikan, namun adakalanya praktik yang terjadi hukumnya tidak jelas. Dari hasil penelitian dan hasil wawancara penulis di lapangan kesalahan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cangu Kecamatan Kalianda tidak hanya terjadi pada akad perjanjian atau lafadz dalam perjanjian saja namun yang penulis temukan juga praktik gadai dengan menggunakan barang yang masih belum seluruhnya menjadi hak milik *rahin* atau bisa disebut barangnya masih dalam angsuran (barang kredit), dan barang yang masih dalam jaminan pihak lain atas utang yang dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Ali (*rahin*) dan Bapak Mukhlisin (*murtahin*), Bapak Syahri (*rahin*) dan Bapak Hendri (*murtahin*) bahwa dalam permasalahan ini *rahin* menggadaikan mobil yang masih dalam kredit atau masih dalam jaminan atas utang . Dalam kasus ini sebelumnya pihak *murtahin* sudah mengetahui bahwa jaminan tersebut masih dalam utang akan tetapi dalam akad sebelumnya *Rahin* tidak mengatakan bahwa angsuran mobil tersebut menunggak. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan

rahin yang mendesak, dikarenakan utang yang belum dilunasi dan bunga yang semakin membengkak.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifi ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Arinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.” (QS. Al-Muthaffifin:1)

Hadits Riwayat Ibnu Majah

عَنْ أَبِي خُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang licik (menipu)” **Shahih**. Al Irwa' (1249). Al

Hadits Al Buyu'. Muslim.

Praktik gadai yang terjadi dengan menggunakan barang kredit ini jelaslah sangat tidak sesuai dengan syariat Islam karena didalamnya terdapat unsur penipuan dan praktik yang terjadi tidak sesuai dengan rukun dan syarat gadai kaitannya dengan (*Ma'qud 'alaih*) yaitu barang gadai yang berupa utang serta masih proses pembayaran. Praktik gadai ini akan mengakibatkan kerugian bagi *murtahin*, dan tentu barang

tersebut tidak boleh menjadi barang jaminan karena syarat penggadaian barang adalah barang gadai tersebut harus benar-benar milik *rahin*.

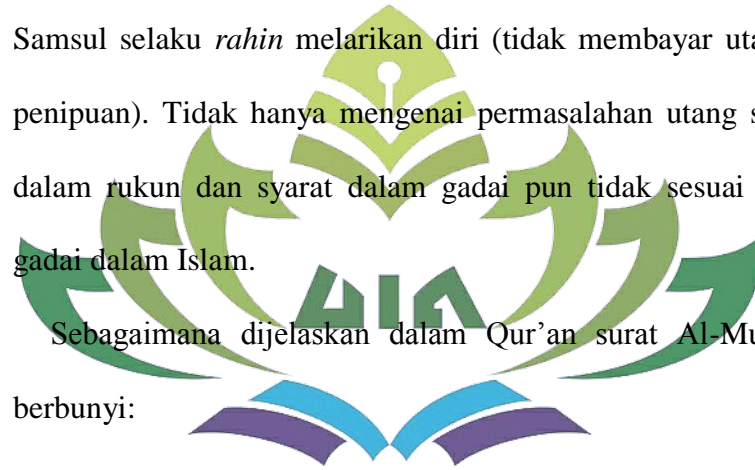
3. Tinjauan Hukum Islam Praktik Gadai Terhadap Penambahan Utang yang terjadi di Desa Canggu Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.

Dalam penambahan barang gadai adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila tergabung seperti, (bertambah) gemuk, maka ia masuk dalam gadai kesepakatan ulama. Sedangkan jika terpisah, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih Ulama Hanafiyah, Muhammad, Hanabilah dan satu pendapat dari Imam Syafi'i menyatakan tidak sah menambah utang sebab dapat dianggap akan *rahn* kedua, padahal *borg* berkaitan dengan *rahn* yang pertama secara sempurna sedangkan Imam Malik, Abu Yusuf, abu Tsur, Al-Majani, dan Ibn Mundzir membolehkan tambahan tersebut sebab *rahn* kedua membatalkan *rahn* yang pertama. Dengan demikian, sama dengan menggadaikan satu *borg* untuk dua utang.

Adapun mengenai permasalahan yang terdapat pada Bab III yaitu transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Samsul (*rahin*) dan Bapak Bustomi (*murtahin*), yang memberikan pinjaman yang berjumlah 30 juta akan tetapi Bapak Samsul meminjam uang lagi untuk modal usaha kue sejumlah 20 juta, menurut penulis transaksi gadai seperti ini tidaklah sah sebab Ulama Hanafiyah, Muhammad, Hanabilah dan satu pendapat dari Imam Syafi'i menyatakan tidak sah menambah utang sebab dapat dianggap akan *rahn* kedua, padahal *borg* berkaitan dengan *rahn* yang

pertama secara sempurna. Penulis setuju dengan pendapat yang pertama sebab yang terjadi pada masyarakat Canggü khususnya gadai yang dilakukan Bapak Samsul penambahan utang tersebut bukanlah pembatalan *rahn* yang pertama melainkan penambahan utang baru. Mengenai permasalahan ini alasan penulis bahwa transaksi gadai yang dilakukan Bapak samsul ini tidak sah sebab transaksi gadai ini berujung pada kerugian pihak *murtahin* yaitu sebelum jatuh tempo pelunasan utang bahwa *marhun bih* tersebut ditarik oleh pihak *leasing*, dan Bapak Samsul selaku *rahin* melarikan diri (tidak membayar utang/ melakukan penipuan). Tidak hanya mengenai permasalahan utang saja akan tetapi dalam rukun dan syarat dalam gadai pun tidak sesuai dengan praktik gadai dalam Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat Al-Mudatsir:38 yang berbunyi:



كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas semua yang diperbuatnya”

Mengenai arti dari ayat tersebut bahwa setiap apapun yang dilakukan itu pasti ada pertanggung jawabannya, maka sebab itu sebelum mengadakan transaksi lebih berhati-hati tidak hanya menggunakan rasa kepercayaan saja, memang dalam hal praktik gadai kepercayaan sangatlah penting, akan tetapi dalam melakukan transaksi jual beli

khususnya gadai, tidaklah kepercayaan saja akan tetapi harus lebih berhati-hati oleh karena itu Allah sangat menganjurkan (*sunnah*) untuk mendatangkan persaksian serta tanda bukti dan adanya surat perjanjian supaya mempunyai kekuatan tetap jika terjadi sengketa dikemudian hari meskipun pada dasarnya akad dalam transaksi bermuamalah yaitu saling tolong menolong, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ لِلَّهِ عِزَّتُهَا
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum Islam terhadap transaksi gadai Mobil Kreditan di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai di Desa Cangu didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam uang dengan adanya barang yang dijadikan jaminan dan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak *rahin* dan *murtahin* (debitur dan kreditur) , dan adanya akad/perjanjian terhadap barang gadaianya, serta adanya perjanjian jatuh tempo pembayaran utang tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjiannya kedua belah pihak hanya melakukan perjanjian secara lisan yang menyatakan telah terjadinya transaksi utang piutang , dan adanya tanda bukti transaksi yang menyatakan sejumlah utang dan keterangan pihak *rahin* dan *murtahin* yang ditandatangani di atas materai 6000, serta dalam praktik gadai tersebut tidak mendatangkan dua orang saksi akan tetapi

mendatangkan satu orang saksi itupun hanya dari salah satu pihak keluarga saja. Praktik gadai di Desa Canggü khususnya gadai mobil kreditan yang dimana ada salah satu rukun dan syarat dalam gadai yang tidak terpenuhi serta adanya penambahan utang dalam transaksi. Praktik gadai di Desa Canggü telah merugikan salah satu pihak yaitu *murtahin* yang dimana sebelum jatuh tempo pelunasan utang barang gadai/*borg* tersebut ditarik oleh pihak *leasing* dengan alasan bahwa angsuran masih dalam tunggakan. Serta adanya pemanfaatan barang jaminan oleh *Murtahin* atas utang *rahin* yang sebelumnya tidak ada perizinan ketika akad dilangsungkan. Maka dari itu praktik yang dilakukan oleh masyarakat Canggü ini tidak dibenarkan sebab tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam yang dimana dapat merugikan salah satu pihak.

2. Gadai yang berupa barang utang, hal seperti ini sering terjadi pada masyarakat di Desa Canggü Kecamatan Kalianda belum sesuai dengan hukum Islam khususnya pada *ma'qud alaih* (barang yang digadaikan), karna masih belum milik sempurna. Seperti halnya dalam syarat gadai bahwa barang gadai tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain atau milik sempurna. Praktik gadai yang terjadi dengan menggunakan barang kredit ini jelaslah sangat tidak sesuai dengan syariat Islam karena terdapat unsur penipuan. Hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi *murtahin*, dan sudah tentu barang tersebut tidak boleh menjadi

barang jaminan karena syarat menggadai barang adalah barang gadai tersebut harus benar-benar milik *rahin*.

B. Saran-Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai praktik gadai pada masyarakat di Desa Cangu Kecamatan Kalianda Lampung Selatan sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat di Desa cangu Kecamatan Kalianda ini harus diperhatikan akad yang diucapkan oleh *rahin* dan *murtahin* harus sesuai syariat Islam, karena akad dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*, apabila akadnya salah maka bisa dipastikan praktik gadai tersebut akan merugikan salah satu antara *rahin* atau tidak menutup kemungkinan *murtahin* yang dirugikan.
2. Manusia mempunyai hasrat hidup bersama, lebih-lebih pada zaman modern ini, tidak mungkin bagi seorang makhluk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan. Salah satu alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan itu yaitu dengan menggadaikan barang tersebut. Sehingga demikian seorang tidak diperbolehkan menggunakan cara bermua'amalah yang menimbulkan kerugian, kecurangan pada pihak lain dan melakukan cara-cara yang dilarang oleh syara'. Demikian praktik gadai yang dilakukan di Desa Cangu tersebut, banyaknya melaksanakan praktik gadai yang merupakan jaminan utang/*borg* masih dalam kredit,serta

tidak mendatangkan para saksi. Praktik itu sangatlah rentang timbulnya sengketa dan banyaknya kecurangan serta penipuan.

3. Dalam pelaksanaan praktik gadai prinsip *ta'awwun* (tolong menolong) jangan sampai terabaikan.

